



Peran *Green Economy* dan *Green Leadership*, dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan

Jati Wahyono Agustinus, Dosen STARKI

1.1 Pendahuluan

Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Maka tidak dipungkiri bahwa banyak negara lain yang membutuhkan pasokan Sumber Daya Alam (SDA) dari Indonesia. Hal inilah yang menjadikan salah satu daya tarik Indonesia, terutama bidang ekonomi. Oleh karena itu, tak heran jika banyak negara yang mengincar kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pengalaman membuktikan, pengelolaan kekayaan alam menimbulkan banyak perdebatan, pembicaraan, dan kepentingan.

Pengelolaan SDA yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran dan menyejahterakan masyarakat banyak dipengaruhi masih belum optimal karena dipengaruhi oleh sektor-sektor lain, baik ekonomi, politik, perkembangan dan pergeseran budaya di masyarakat, perkembangan teknologi, dan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya tata kelola yang belum tertata dengan baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum adanya kesinambungan antara pusat dan daerah juga mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan SDA. Tata kelola tidak terlepas dari

peran manajemen yang baik dan tepat. Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya, selain itu proses manajemen juga terkait dengan lingkungan di mana individu bekerja sama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih.

Selain tata kelola yang baik, proses perubahan iklim, pemanasan global, menjadi bencana yang mengancam dunia saat ini, termasuk Indonesia. Selain itu, eksploitasi yang mengeruk SDA yang dimanjakan dengan SDA yang mudah didapat, kurangnya kesadaran manusia akan menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan, akan menghambat program pemerintah Indonesia terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang dengan pembangunan rendah karbon yang menekankan pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pelestarian alam, menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan. Hal inilah yang menjadi salah satu

pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali-Indonesia beberapa waktu yang lalu dengan mengusung konsep Ekonomi Hijau.

Pengelolaan SDA yang tepat dan berpihak pada masyarakat harus dilakukan dan diperkuat oleh Indonesia agar dampak dari pengelolaan SDA yang tidak tepat dapat kita hindari. Selain pengelolaan SDA yang tepat dan berpihak pada kemakmuran masyarakat juga diperlukan peran seorang pemimpin yang tegas, memiliki rumusan dan kebijakan akan visi kedepan dalam pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan ekonomi dengan konsep *Green Economy* (GE) menjadi salah satu bagian yang penting diterapkan manajemen baik dalam lingkup organisasi, perusahaan, maupun lingkup sebuah negara. Manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol terhadap kebijakan yang telah disusun, terutama kebijakan dalam pengelolaan SDA yang bijak. Konsep *green economy* atau ekonomi hijau dapat membantu atau dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan pengelolaan SDA yang tepat.

1.2 Pengertian Green Economy (GE)

Eksplotasi SDA yang secara terus menerus akan banyak mengakibatkan dampak negatif, sebaliknya GE akan menciptakan tingkat ramah lingkungan yang lebih tinggi dan memberikan banyak inovasi dari energi terbarukan, tidak hanya pada sumber daya yang berasal dari fosil, yang akan menghasilkan efek rumah kaca. Oleh karena itu, banyak ahli yang mendukung bagaimana pelaksanaan GE ini yang lebih ramah lingkungan.

Ada beberapa definisi GE :

Ekonomi hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko dan kelangkaan ekologi, dengan kata lain, GE adalah rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusif secara sosial. Oleh karena itu terkait pula dengan bagaimana pertumbuhan dan pendapatan lapangan didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi dan polusi serta meningkatkan efisiensi sumber daya (UNEP, 2011). Dari definisi tersebut ada dua hal utama dari tujuan GE yakni selain peningkatan kesejahteraan masyarakat/bersama, GE juga mengurangi pencemaran atau polusi di lingkungan sekitar.

Pengertian ekonomi hijau dari perspektif bisnis menurut *International Chamber of Commerce* (International Chamber of Commerce, 2011) adalah ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi dan lingkungan bertanggungjawab bersama dengan cara saling memperkuat serta mendukung kemajuan sosialnya. Pengertian ekonomi hijau yang lebih holistik adalah pengertian menurut Chapple (Chapple, 2008) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi dengan energi bersih, terutama terdiri dari empat sektor yakni energi terbarukan (energi matahari, angin, panas bumi); energi terbarukan ini merupakan sumber daya alternatif selain energi dari fosil yang makin lama makin mengalami pengurangan, *green house*, terciptanya peralatan teknologi yang hemat energi, infrastruktur dan transportasi yang hemat energi, dan daur ulang limbah menjadi energi.

Ekonomi hijau atau *green economy* dalam teori klasik merupakan salah satu bidang

multidisiplin yang terdiri dari elemen sosial, ramah lingkungan, dan ekonomi yang keseimbangannya menjadikan ekonomi berkelanjutan. Menurut Karl Burkart melalui Vukovic *et al.* (Vukovic *et al.*, 2019) mendefinisikan ekonomi hijau berdasar enam sektor utama yakni:

1. energi terbarukan
2. bangunan/gedung hijau ramah lingkungan
3. transportasi berkelanjutan
4. pengelolaan air berkelanjutan
5. pengelolaan sampah yang tepat
6. pengelolaan lahan yang bermanfaat

Kriteria penilaian ekonomi hijau harus mencakup minimal satu dari enam kriteria dari setiap elemen hijau tersebut; artinya bahwa salah satu dari sektor utama dalam energi hijau tersebut dapat terlaksanan dengan baik. Keenam faktor tersebut saling berhubungan dan terkoneksi dengan ekonomi hijau; jika satu sektor dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pula pada masyarakat, lingkungan, dan organisasi.

1.3 Green economy dimulai dari Green Leadership (GL)

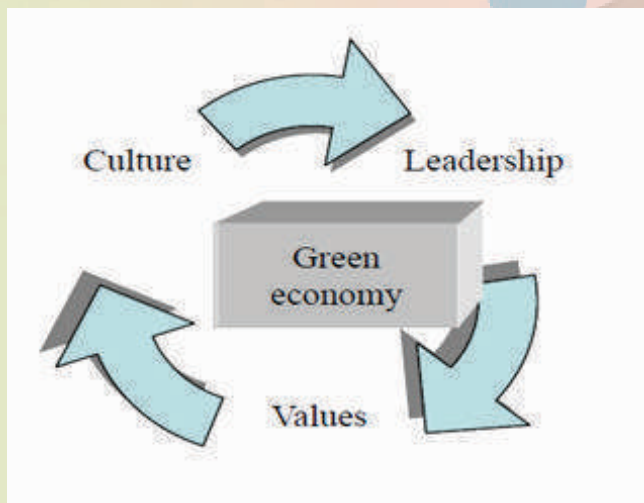
Teori mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi dapat dipahami melalui hubungan pemimpin dan pengikut dalam konteks ekonomi hijau. Perubahan yang terjadi di masyarakat misalnya perkembangan teknologi, efek perubahan lingkungan alam, dampak rumah kaca, dan lain-lain; berdampak pada berbagai sektor juga akan berpengaruh terhadap perubahan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan perlu dilengkapi kembali untuk menangani masalah-masalah baru yang muncul dalam sebuah organisasi.

Struktur, rencana, dan konsep merupakan elemen penting bagi efektivitas organisasi, namun hal terpenting adalah bahwa pemimpin harus mencapai tujuan melalui kemampuan untuk membimbing, memotivasi, dan mengintegrasikan upaya orang lain melalui tindakan mereka sebagai pemimpin (Blake, 1985). Oleh karena itu peran pemimpin dalam menerapkan GE dalam sebuah organisasi menjadi salah satu faktor penentu agar para pengikut dan pemimpin memiliki visi bersama ke depan untuk pelaksanaan GE. Kemampuan untuk membimbing, memotivasi, dan mengintegrasikan ini akan sulit dilakukan bila peran pemimpin tidak maksimal. Kontribusi tersebut tidak hanya dilakukan untuk keuntungan hari ini, namun diperlukan pengembangan jangka panjang, organisasi mereka harus dapat berubah, beradaptasi, dan tumbuh.

Konsep kepemimpinan yang mengalami perubahan, juga mengakibatkan peran pemimpin yang peduli terhadap lingkungan juga diperlukan dalam organisasi baik berorientasi pada bisnis maupun nirlaba. Istilah kepemimpinan hijau/ GL menjadi sebuah istilah yang tidak asing bagi kita ketika peran seorang pemimpin yang berwawasan pada kepedulian terhadap lingkungan; tidak hanya mengejar keuntungan semata namun juga memiliki kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan yang lestari. Selain itu, GL juga diperlukan seorang pemimpin yang memiliki semangat, proaktif, penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam sekitar. Bentuk-bentuk kepedulian tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan dan kehidupan organisasi tersebut di kemudian hari. Kepemimpinan hijau dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin

dalam mempengaruhi, menggerakkan anggota organisasi untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang pro pada pelestarian lingkungan, namun juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha dalam praktiknya organisasi tersebut menghasilkan produk ramah lingkungan yang minim pencemaran lingkungan; dengan kata lain, kepemimpinan hijau adalah kepemimpinan yang berpihak/berorientasi pada kelestarian lingkungan. Peran pemimpin dalam sebuah organisasi menjadi motor penggerak utama (Kardoyo *et al.*, 2020).

Transformasi kepemimpinan tradisional ke kepemimpinan hijau merupakan salah satu dari tiga elemen kunci untuk mengubah kepemimpinan dalam ekonomi hijau. Proses tersebut dapat dilihat dari gambar 1 berikut yang menunjukkan tiga elemen kunci yang saling terkait dan GE (Green & McCann, 2011).



Gambar 1. Elemen kunci untuk mengubah kepemimpinan dalam ekonomi hijau

Kemampuan kepemimpinan hijau untuk mempengaruhi anggota organisasi bertujuan untuk mengarahkan pada pencapaian visi organisasi

jangka panjang, termasuk dalam keberlanjutan ekologi, selain itu, kepemimpinan hijau juga harus melihat pada inovasi dan peluang bisnis baru. Peluang bisnis baru tersebut tentu berkaitan dengan produksi yang ramah lingkungan. Penentuan peluang bisnis baru oleh GL dibarengi dengan memperkuat nilai-nilai inti pembangunan berkelanjutan, perubahan organisasi yang pada akhirnya mencapai pertumbuhan keuangan dan keunggulan kompetitif bagi organisasi/perusahaan (Egri & Herman, 2000).

Tiga karakteristik GL adalah

- 1) keterbukaan terhadap perubahan; kepemimpinan hijau harus terbuka terhadap perubahan yang terjadi dewasa ini. Pengaruh perkembangan teknologi, digitalisasi, pengaruh perekonomian sebuah negara, dan faktor lain menjadi unsur penunjang perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin hijau harus terbuka untuk membuat perubahan secara signifikan dalam penerapan nilai-nilai hijau, sosial masyarakat, dan organisasi untuk perusahaan yang berkelanjutan;
- 2) peningkatan diri/ *self-enhancement*; seorang pemimpin hijau harus memiliki dan memegang nilai-nilai keutamaan diri dalam pencapaian tujuan lingkungan organisasi. Seorang pemimpin hijau tidak mudah terpengaruh untuk keluar dari nilai-nilai keutamaan yang berpihak pada kelestarian lingkungan;
- 3) etika dan motif ekonomi berarti bahwa pemimpin hijau harus dapat membuat keputusan etis dalam rangka keberlangsungan bisnis organisasi (Lee *et al.*, 2014)

1.4 Implementasi dan Keuntungan GE

Apabila dalam sebuah organisasi sudah memiliki kesepakatan bersama di antara *stakeholder*, dan memiliki pemahaman serta pengertian dari tujuan yang sama bahwa GE menjadi suatu hal yang penting serta perlu diimplementasikan secara bersama-sama, maka sudah selayaknya pelaksanaan GE menjadi perhatian utama. Kesuksesan pelaksanaan GE pada dasarnya didukung oleh *stakeholder* yang terkait. Namun pada pelaksanaannya, implementasi GE dan pembangunan yang berkelanjutan banyak mengalami kendala. Kendala yang dihadapi adalah terkait dengan 1) regulasi; yakni kebijakan-kebijakan yang belum pro pada GE, 2) kelembagaan; lembaga/organisasi yang tidak kuat akan mempengaruhi keberhasilan sebuah

program GE yang direncanakan, lemah dalam kepemimpinan, sehingga tidak memiliki kebijakan yang kuat, juga lemah pada keuangan 3) anggaran biaya yang kecil/kurang, dan 4) partisipasi akan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan yang masih rendah. Kurangnya partisipasi yang dimaksud adalah kurangnya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, swasta, masyarakat terhadap kepedulian terhadap GE ini. Kurangnya keterlibatan ini diawali dengan kurangnya kesadaran akan pelestarian lingkungan (Putri Rohima & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022) dan (Wahid *et al.*, 2018)

Implementasi atau pelaksanaan GE pada hakikatnya harus memenuhi dari tiga dimensi prinsip : ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Tabel 1 Dimensi Prinsip *Green Economy*

Dimensi	Prinsip
Ekonomi	1.mengakui modal dan nilai-nilai alam
	2.menciptakan pekerjaan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi hijau
	3.terintegrasi ke dalam model pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
	4.mempromosikan sumber daya dan efisiensi energi
	5.menginternalisasikan eksternalitas
Lingkungan	1.melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem
	2.berinvestasi dan mempertahankan modal alam
	3.mengakui dan menghormati batas-batas bumi dan batas-batas ekologis
	4.memajukan tujuan keberlanjutan lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan
	5.mengurangi dampak lingkungan yang merugikan
Sosial	1.pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, mata pencaharian, perlindungan sosial, kualitas hidup dan akses ke pelayanan yang penting yang baik
	2.inklusif, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan, dan stabil
	3.mengurangi ketimpangan agar lebih adil, wajar, seimbang

Ekonomi hijau memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang di bumi ini. Ekonomi hijau dilihat dari aspek sosial berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, yakni penyediaan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih layak untuk manusia. Aspek lingkungan meliputi pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Sedangkan aspek ekonomi hijau berkaitan dengan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya alam dan lingkungan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia di dunia. Dari tabel 1 tersebut, merupakan rangkuman dari prinsip-prinsip ekonomi hijau, yang menempatkan modal alam merupakan perwujudan perlindungan ekosistem yang membantu dalam memanfaatkan nilai ekonomi, terutama bagi orang miskin di negara-negara berkembang saat ini, juga nilai pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan yang semakin masif. Elemen-elemen tersebut menyiratkan bahwa ekonomi hijau berusaha menciptakan insentif untuk kegiatan ekonomi yang juga melestarikan lingkungan dan sosial (Ali *et al.*, 2021).

Beberapa manfaat dari GE di setiap negara tentu berbeda-beda. Negara agraris misalnya tentu akan memiliki manfaat ekonomi

hijau yang berbeda dengan negara yang sudah maju terutama dalam teknologi; juga di negara-negara berkembang. Transformasi ekonomi hijau menargetkan pemanfaatan sumber daya alam dan pertanian menjadi sektor yang dominan misalnya pada negara yang agraris. Selain itu ekonomi hijau juga membantu meningkatkan kehidupan dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan *Produk Domestik Bruto* (PDB) sebuah negara; mengurangi jumlah pengangguran; pengurangan impor energi; (sehingga menciptakan energi alternatif sebagai energi terbarukan; penciptaan bola lampu dengan emisi rendah/ LED, energi surya dan lain-lainnya); program agroforesti, efisiensi penggunaan sumber air, tanah, pengurangan polusi merupakan manfaat-manfaat yang didapat sebuah negara dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Pemanfaatan ekonomi hijau tersebut pada dasarnya akan berdampak pula pada peningkatan kesehatan dan kualitas hidup serta pelestarian lingkungan, hingga mengatasi pokok masalah tantangan lingkungan dengan membangun sistem yang dapat menangani masalah seperti pengolahan limbah, penggunaan kembali dan daur ulang sehingga mengurangi biaya pemeliharaan dan infrastruktur. Dalam tabel 2 berikut ini menunjukkan manfaat dari ekonomi hijau (Ali *et al.*, 2021).

Tabel 2 Manfaat *Green Economy*

Manfaat Ekonomi	Manfaat sosial	Manfaat Lingkungan
Berkurangnya kemiskinan dan ketidaksetaraan	Berkurangnya kemiskinan dan ketidaksetaraan	Pengelolaan aset dan SDA berkelanjutan
Peningkatan ekonomi dan lapangan kerja	Mengurangi ketimpangan sosial	Mengurangi gas rumah kaca dan emisi lainnya
Pengembangan pasar dan spesialisasi	Peningkatan lapangan kerja	Adaptasi lebih baik terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana
Peningkatan produktivitas, komoditas dan hasil pertanian	Peningkatan pelatihan dan keterampilan	Peningkatan kualitas lingkungan
Peningkatan keamanan energi	Pelayanan publik yang lebih baik	
Peningkatan daya saing dan neraca perdagangan	Peningkatan kesehatan	

1.5 Penutup

GE merupakan salah satu jawaban dari segi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seiring dengan menurunnya kualitas lingkungan dan banyaknya polusi pencemaran lingkungan karena proses produksi dan ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan maka pelaksanaan ekonomi hijau merupakan satu keniscayaan.

Pelaksanaan ekonomi hijau tidak terlepas dari peran seorang pemimpin terhadap kepedulian, perencanaan dan kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang memiliki visi kuat dan tegas terhadap keberpihakan pelestarian lingkungan. Dengan terlaksananya ekonomi hijau maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara lebih luas ke masyarakat./GN/

Referensi:

- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
- Blake, R. R. and M. J. S. (1985). *The Managerial Grid III : The Key to Leadership Excellence*. Gulf Publishing Company.
- Chapple, K. (2008). *Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development*.
- Egri, C. P., & Herman, S. (2000). LEADERSHIP IN THE NORTH AMERICAN ENVIRONMENTAL SECTOR: VALUES, LEADERSHIP STYLES, AND CONTEXTS OF ENVIRONMENTAL LEADERS AND THEIR ORGANIZATIONS. In ^ *Academy of Management Journal* (Vol. 43, Issue 4).
- Green, D. D., & McCann, J. (2011). Benchmarking a leadership model for the green economy. *Benchmarking*, 18(3), 445–465. <https://doi.org/10.1108/14635771111137804>
- International Chamber of Commerce. (2011). *The ICC Task Force on Green Economy*.
- Kardoyo, K., Feriady, M., Farliana, N., & Nurkhin, A. (2020). Influence of the Green Leadership Toward Environmental Policies Support. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 459–467. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.459>
- Lee, M. H., Lin, C., Lin, C. K., & Lu, W. Y. (2014). Moderating Effect Of Institutional Responsiveness On The Relationship Between Green Leadership And Green Competitiveness. *Social Behavior and Personality*, 42(9), 1483–1494. <https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.9.1483>
- Putri Rohima, A., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2022). FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA JAMBI. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.26>
- UNEP. (2011). *Towards a green economy : Pathways to Sustainable development and poverty eradication*. UNEP.
- Vukovic, N., Pobedinsky, V., Mityagin, S., Drozhzhin, A., & Mingaleva, Z. (2019). A study on green economy indicators and modeling: Russian context. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17). <https://doi.org/10.3390/su11174629>
- Wahid, U., Semarang, H., Pendukung, F., Faktor, D., Dalam, P., Pembangunan, M., Berwawasan, P., Lestari, A. W., Kunci, K., Penghambat, F., Pembangunan, ;, Dan, P. ;, & Lingkungan, B. (2018). *A.4 Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik*.